



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT BADAN LEGISLASI DENGAN IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA DAN
IKATAN KONSULTAN PAJAK DAN KEPABEANAN
SELASA, 6 FEBRUARI 2018**

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: III (tiga)
Rapat ke-	: -
Jenis Rapat	: RDPU
Hari, Tanggal	: Selasa, 6 Februari 2018
Waktu	: 15.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lantai 1
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, S.E.
Sekretaris Rapat	: Widiharto, S.H., M.H.
Acara	: Masukan dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan Ikatan Konsultan Pajak dan Kepabeanaan
Hadir	: 32 orang, izin 4 orang dari 74 orang Anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. DR. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Arif Wibowo
3. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
4. H. Totok Daryanto, S.E.
5. DR. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

PERJUANGAN:

5 dari 14 orang Anggota

1. Andreas Hugo Pareira
2. Abidin Fikri, S.H.
3. DR. R. Junimart Girsang
4. Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani
5. Diah Pitaloka

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

3 dari 9 orang Anggota

1. H. Bambang Riyanto, S.H., M.H., M.Si
2. Drg. Putih Sari
3. Ir. Dwita Ria Gunadi

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

6 dari 11 orang Anggota

1. DR. Saiful Bahri Ruray, S.H., M.Si
2. Wenny Haryanto
3. Tabrani Maamun
4. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
5. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag. M.H.
6. TB. H. Ace Hasan Syadzili

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 dari 8 orang Anggota

1. DR. Ir. Bahrum Daido, M.Si
2. KRMT Roy Suryo Notodiprojo
3. Sayed Abubakar Assegaf

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 dari 5 orang Anggota

1. Haerudin, S.Ag, M.H.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

1 dari 6 orang Anggota

1. DR. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

5 dari 5 orang Anggota

1. Ir. H.A. Junaidi Auly, M.M.
2. H.M. Martri Agoeng, S.H.
3. DR. Hermanto, S.E., M.M.
4. Drs. H. Adang Daradjatun
5. dr. H. Adang Sudrajat, M.M., AV

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 dari 5 orang Anggota

1. DR. Hj. Reni Marlinawati

FRAKSI PARTAI NASDEM:

1 dari 5 orang Anggota

1. Hamdani, S.IP

FRAKSI PARTAI HANURA:

1 dari 1 orang Anggota

1. DR. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, S.H., M.M., M.H.

IZIN:

1. Andreas Eddy Susetyo
2. Ichsan Firdaus
3. DR. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si
4. Abdul Wachid

KETUA RAPAT (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota badan legislasi,

Yang terhormat ketua umum ikatan konsultan pajak Indonesia beserta seluruh jajarannya,

Yang terhormat ketua ikatan konsultan pajak dan kepabeanaan serta seluruh jajarannya, dan hadirin semua yang berbahagian.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, *Allah Subhanahuwata'ala* yang atas rahmat dan karunianya, kita pada siang hari ini dapat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi.

Berdasarkan laporan Sekretariat rapat hari ini telah ditandatangani oleh 30 orang dan yang izin 4 orang, 9 fraksi, sehingga rapat ini sudah cukup walaupun tidak perlu quorum karena RDPU bukan rapat pengambilan keputusan, hanya untuk mengambil masukan-masukan sesuatu yang sedang dibahas di alat kelengkapan.

Ibu-Ibu dan Bapak semuanya yang saya hormati,

Dengan demikian rapat bisa kita mulai, dan dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* rapat saya bukan dan menyatakan rapat terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 15.35 WIB)

Rapat Badan Legislasi pada hari ini diagendakan untuk melakukan RDPU dengan Ikatan Pajak Indonesia dan Ikatan Konsultan Pajak dan Kepabeanaan. Terkait dengan pengharmonisasian

RUU tentang Konsultan Pajak yang tadi sudah disampaikan kepada Pengusul kepada Badan Legislasi.

Untuk kelancaran jalannya rapat kami bacakan susunan agenda rapat sebagai berikut.

1. Pengantar
2. Masukan pandangan dari ikatan konsultan pajak Indonesia dan ikatan konsultan pajak dan kepabeanaan.
3. Tanya jawab
4. Penutup.

Rapat ini akan berlangsung hingga pukul 16.30 WIB

(RAPAT SETUJU)

Apabila ada hal-hal yang perlu didalami lebih lanjut, maka akan ditambah atas kesepakatan dari seluruh anggota.

Ibu dan Bapak.

Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Ketua Umum, siapa duluan ini mau IKPI atau IKPK. Kalau dari sini yang kiri, ya jadi yang kiri dulu pak, IKPI dulu ya baru IKPK. Waktunya 10 menit lebih bagus pak, bisa lebih singkat lagi lebih bagus lagi.

Silakan pak.

IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA (IKPI):

Terima kasih Bapak Pimpinan

Bismillahirrahmanirrahim

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Pertama-tama kami dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini dan langsung saja ke acara. Menurut IKPI Undang-Undang Konsultan Pajak Indonesia sangat diperlukan pak, mengapa. Karena tugas dari pada konsultan pajak Indonesia itu cukup penting. Penting untuk negara, untuk masyarakat. Masyarakat terutama pajak. Kita tahu bahwa peranan pajak dalam pembangunan Indonesia sangat menentukan sehingga perlu didukung oleh semua pajak termasuk konsultan pajak.

Pembayar pajak yang merupakan sebagian besar adalah pengusaha, tidak mungkin waktunya untuk mempelajari peraturan perpajakan yang sedemikian banyak apalagi dengan memperhatikan aturan pelaksanaan yang ratusan jumlahnya. Maka perlu dibantu oleh konsultan pajak. Konsultan pajak dengan demikian secara filosofis melindungi masyarakat wajib pajak. Dan sekaligus mendukung pencapaian penerimaan negara dari pajak melalui peningkatan kepaguan wajib pajak.

Undang-Undang Konsultan Pajak melindungi kepentingan profesi konsultan pajak sesuai dengan standar profesi dan kode etik. Itu tinjauan secara filosofis. Sedangkan secara sosiologis, konsultan pajak sangat diperlukan sebagai mitra strategis sebagai otoritas pajak untuk meningkatkan penerimaan.

Kemudian manfaatnya adalah wajib pajak supaya tidak memikul beban melebihi yang seterusnya. Karena akibat dari didatanya undang-undang. Oleh karenanya perlu dibantu oleh konsultan pajak. Undang-Undang Konsultan Pajak dibutuhkan sebagai payung hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan ... dan sekaligus kesetaraan dengan negara lain.

Secara filosofis secara yuridis Undang-Undang Konsultan Pajak memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi profesi konsultan pajak sebagaimana akuntan publik, advokat dan sebagainya. Juga Undang-Undang Konsultan Pajak menyelaraskan dengan pengaturan profesi konsultan pajak di negara lain sebagai branch mark pak yang sudah berdasarkan undang-undang nya, seperti pada Jepang, Korea dan Australia.

Oleh karenanya kami mendukung sekali usulan Undang-Undang Pajak, Rancangan Undang-Undang Pajak dibahas didalam Rapat Dengar Pendapat ini dan mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita semua dapat menjadi undang-undang sebagaimana yang kita harapkan.
Terima kasih pak.

KETUA RAPAT:

Baik dilanjutkan pak, dari IKPK silakan.

IKATAN KONSULTAN PAJAK DAN KEPABEANAN (IKPB):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh
Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua.

**Yang pertama Pimpinan rapat yang selalu kita doakan semoga sehat dan diberikan rahmat dan kebaikan,
Yang terhormat para Anggota Dewan Badan Legislasi.**

Ini menjadi sebuah berita, menjadi sebuah gagasan yang sangat positif tentang bagaimana sebuah konsultan pajak diatur menjadi sebuah undang-undang tersendiri dan kami mewakili dari wajib pajak juga, Pak Pimpinan rapat bahwa bagaimana ini menjadi sebuah berita positif, karena 90% dari wajib pajak kita itu tingkat atau wajib pajak itu sendiri. Sehingga kami sangat yakin dengan adanya Undang-Undang Pajak 13 ini, ini menjadi sebuah dorongan yang sangat nyata. Bagaimana tingkat kepatuhan pajak itu dapat lebih baik dan kami pikir bagaimana ujungnya itu akan lebih baik.

Kami dari Ikatan Konsultan Pajak dan Kepabeaan, di sini ada Pak Bambang Suharso. Beliau ini komandan kita pak, kemudian Ibu Marisa ya, kemudian ada Pak Safar, ada mas Ervin, ada Bang Beni, ada juga ... *Insy Allah* kita akan memberikan pikiran-pikiran yang terbaik yang adapun menurut kami itu akan melengkapi apa yang sudah menjadi Rancangan Undang-Undang sebelumnya. Izin nanti Pak Bambang a sampai z nanti akan sangat menguasai pak. Beliau akan memaparkan lebih dari 20 poin. Kami akan poin per poin, masukan perskrip terhadap RUU yang sudah ada.

Pak Bambang monggo kami persilakan. Terima kasih

IKPI (BAMBANG):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh
Selamat siang Bapak Pimpinan.

Anggota Dewan yang terhormat, Pak Badir dan teman-teman semua,

Seperti yang disampaikan oleh Pak Ajib, kebetulan sekali kita ini yang muda-muda itu berasal dari angkatan yang sudah ada. Dan kita konsen sekali diantara kita tadi yang anggota HIMPI, anggota KADIN, anggota profesi sehingga kita ada dimana-mana dan secara kebetulan sekali tadi juga langsung disampaikan bahwa Tahun 2018 dengan Pak Robert Pakpahan sebagai DPJ 1, itu ditargetkan gross itu sebesar 37%, sementara 2014-2017 itu gross aktualnya hanya 4%. Lalu bagaimana kita membantu Pemerintah agar hal itu bisa tercapai.

Nah Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak yang sudah ada sebenarnya cukup bagus. Tapi ada beberapa hal detail yang bisa dilihat di layar kelihatan atau tidak ya? langsung saja. Pada bagian menimbang di bagian awal dikatakan bahwa orang konsultan pajak itu harus ikut aturan perpajakan. Menurut kami tidak hanya aturan perpajakan tapi juga banyak. Kenapa? Dasar kita berpraktek itu ada KUHP, Undang-Undang PT, jadi perlu ditambahkan di sini, perlu ditambahkan di sini Peraturan yang lain. Jadi tidak hanya perpajakan terus kemudian juga pada 1 Pasal 1 perlu ditambahkan, Pasal 1 itu belum ada. Jadi perlu ditambahkan ya.

Lalu Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Bab II Pasal 3 ayat (1), di sini ditambahkan adanya kalau menjadi konsultan pajak itu harus dia menjadi contoh, tapi apa *at least* setidaknya tidaknya dia sudah menjadi wajib pajak, bagaimana seorang konsultan pajak kalau dia tidak menjadi wajib pajak. Jadi dia harus jadi contoh pelayan yang akan diberikan aplikasi. Jadi setidaknya-tidaknya dia sudah punya NPWP selama 5 tahun sekurang-kurangnya. Harus punya NPWP.

Terus kemudian di Bab II Pasal 3 ayat (1) kita melihat bahwa ada konsultan pajak yang mendapatkan sertifikasi tetapi juga ada mereka yang berasal dari PNS Kementerian Keuangan. Terutama Direktorat Jenderal Pajak. Tahun-tahun sekitar Tahun 1997, 1998, dan 2003 pada saat reformasi perpajakan digulirkan. Itu juga banyak orang-orang yang terlibat dalam reformasi perpajakan sehingga organisasi berubah dengan cepat. Tetapi diantara mereka juga ada yang pada saat itu juga memutuskan berdikari. Artinya apa, mengajukan pensiun dini dan mereka mengajukan buka usaha sendiri dan mereka berkembang.

Nah kami merasa perlu menganggap kemampuan mereka itu jangan disia-siakan. Rasanya apa, kalau Bapak Pimpinan bisa saya berikan contoh beberapa dari mereka yang berasal dari Kemenku itu berada pada posisi-posisi tertentu yang lumayan oke dan berkembang di luar. Dan saya pikir bila ini dapat dimasukkan dalam pasal tersebut, Bab II Pasal 3 ayat (1) dalam hal mereka mendapat piagam penghargaan dari DJP dari otoritas pajak Indonesia, mereka pernah bekerja di DJP selama kurang lebih 6 tahun dengan pangkat terendah 3B, telah memiliki kuasa hukum pada pajak. Karena kajian dari pada RUU ini sendiri tidak membahas mengenai kuasa hukum yang ada di Dirjen Pajak.

KETUA RAPAT:

Mohon maaf saya potong sedikit pak.

IKPI (BAMBANG):

Baik pak.

KETUA RAPAT:

Itu bahan-bahan presentasi sudah diserahkan ke Baleg belum ya pak? baik dari IKPI maupun dari IKPK.

IKPI (BAMBANG):

Belum,

KETUA RAPAT:

Tidak, ini yang ditayangkan ini sudah diserahkan ke kita atau belum? Belum ya?

IKPI (BAMBANG):

Akan diserahkan.

KETUA RAPAT:

Ini minta selengkapnya diserahkan kepada kita.

IKPI (BAMBANG):

Baik pak, dan bahannya nanti akan kita serahkan dalam sesi berikutnya dan akan kami lanjutkan kembali. Di pengadilan pajak itu ada kuasa hukum. Dan untuk mendapatkan kuasa hukum dan izin kuasa hukum, itu biasanya mereka harus mendapatkan sertifikasi sebelumnya. Jadi ada

salah satu dan segala macam. Nah dalam salah satu kesempatan itu yang mendapatkan izin kuasa hukum telah memiliki izin kuasa pajak. Nah itu harus diakomodasi.

Lalu kemudian juga seharusnya pada Bab II Pasal 3 ya itu tertulis pensiun seharusnya tidak hanya pensiun tapi diganti menjadi pernah bekerja kepada Direktorat Jenderal Pajak. Karena kalau pensiun itu artinya sudah selesai pengabdianya. Sementara ada juga masih produktif dan mereka bisa memberikan sumbangsih yang luar biasa kepada negara.

Terus kemudian ada beberapa pasal yang perlu ditambahkan bahkan ada Bab II Pasal 4 ada sebuah judul tidak ada namanya, musti ditambahkan. Terus kemudian pada Bab II Pasal 4 ayat (4) perlu ditambahkan bahwa izin kasad tingkat b seharusnya diberikan pada orang telah bekerja pada Direktorat Jenderal Pajak dengan masa kerja minimal 10 tahun.

Selanjutnya di Bab II Pasal 4 ayat (5) itu juga sama bahwa seharusnya mereka yang mendapatkan izin kuasa hukum di pengadilan pajak. Karena pengadilan pajak itu sifatnya lebih final lebih aktif dari konsultan biasa. Tapi mereka juga bisa konsultan pajak. Terus kemudian bagi mereka yang sudah bekerja atau mendapatkan anggaran dari negara baik itu anggaran dari Pemerintah pusat baik daerah ataukah dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMD, tidak diperkenankan konsultan pajak, itu usulan kami. Di Bab II Pasal 4 ayat (5). Maaf Bab III Pasal 11 ayat (1).

Kemudian juga pada Bab IV Pasal 12 ayat (2). Itu juga perlu ditambahkan bahwa yang diterima oleh konsultan pajak, harus dibuat dalam satu bentuk proposal tertulis. Ini untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang tidak terlihat, artinya semua harus secara tertulis dengan jelas.

Berikutnya juga ada organisasi pengawas dibagian Bab VII Pasal 11 ayat (1). Nah kalau organisasi dibentuk tentu saja pengawas merupakan sesuatu yang sangat fundamental dan sangat penting sekali. Nah artinya apa? orang yang ditunjuk atau Deputi pengawas itu setidaknya-tidaknya mempunyai kapabilitas dalam hal apa? dalam hal penyidikan dan dalam hal pengalaman. Kami menyarankan kalau bisa yang menjadi anggota pengawas konsultan pajak adalah mereka yang setidaknya-tidaknya akademisi lulusan S2 dengan bidang akuntansi, ekonomi, hukum atau telah bekerja dalam bidang yang sama seperti pajak setidaknya tidaknya 20 tahun lamanya. Jadi secara kapabilitas memang sudah mampu menjadi pengawas. Jadi karena kalau tidak memiliki kemampuan yang sama tidak mungkin mengawasi.

Lalu kemudian ada hal yang penting juga seperti bapak konsultan pajak Pak Subakir mengatakan kita punya peran yang luar biasa seharusnya dan ini belum masuk diprofile yang ada. Apa itu? yang menjadi konsultan pajak seharusnya tahu persis bagaimana ekonomi ini berputar. Sehingga ada keharusan kita memberitahukan kepada teman-teman di DJP atau Kemenku bagaimana seharusnya meningkatkan penerimaan. Kita tahu sekarang kalau hari-hari ini terjadi, kita punya *cover grade* pada badan itu 25%, orang pribadi 30%. Sementara negara sebelah itu lebih rendah. Dan yang terjadi, kalau hari ini ada penjualan perusahaan kalau pemiliknya adalah orang pribadi maka dia akan kena 30%. Nah apa yang terjadi, hari ini banyak terjadi bahwa penjualan perusahaan itu dibuat sedemikian rupa dilarikan ke luar. Kenapa? Negara kita Singapura tidak punya... sementara kita ada.

Harus ditambahkan di Rancangan Undang-Undangnya harus memberikan masukan setiap aturan yang kami buat. Kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan nanti dari teman-teman dari kita akan memberikan tambahan. Ada yang ingin menambahkan atau bagaimana?

KETUA RAPAT:

Atau ini kita buka dulu tanya jawab sambil nanti dari pertanyaan itu bisa kita kembangkan penjelasan atau pandangannya, untuk dapat memanfaatkan waktu pak. Kan tadi saya bicara dengan Pimpinan untuk kepentingan pembahasan di harmonisasi. Kalau anggota sudah terpikir, ini kan sudah ada dua organisasi ada IKPI ada IKPK. Sebenarnya kalau ada perwakilan dari IKPI dan IKPK ya satu orang dan dua orang yang memang ahli di bidang itu. Karena sering kali antara anggota Dewan dan Baleg itu sifatnya politis pak. Jadi misalnya prinsipnya bagaimana harus adil, proporsional, tidak merugikan, nanti bayar pajak tambah banyak, kan tujuannya itu tuh.

Baik dalam merumuskan dalam norma-norma itu, bisa jadi tidak mengerti dalam prakteknya sehingga ada yang diminta untuk konfirmasi. Nah begitu kan bapak dan ibu. Kalau disetujui jadi diperlukan seperti Tenaga Ahli pak. Kita punya Tenaga Ahli juga. Tenaga Ahli kita sudah pasti bukan

konsultan pajak. Jadi ketika kita membahas ini belajar juga sambil menerka-nerka seperti apa sih konsultan pajak itu yang baru dibahas di DPR RI.

Jadi kalau nanti sambil menunggu kabar dari kami kalau ada dua orang atau satu orang yang memang ahli dibidangnya silakan mewakili IKPI atau IKPK dinamanya didaftarkan di Badan Legislasi untuk diundang setingkat Tenaga Ahli untuk mendapatkan informasi bila diperlukan.

Sekarang silakan anggota, Silakan anggota dari belakang silakan.

FPKS (DR. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terima kasih Ketua

**Yang saya hormati Ketua dan Anggota Balesg,
Rekan-rekan dari IKPI dan IKPK,**

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Saya menyampaikan apresiasi kehadiran Pimpinan IKPK dan IKPI di forum Rapat Dengar Pendapat ini. Tentunya pandangan-pandangan dan gagasan yang disampaikan memberi manfaat untuk kami di DPR RI untuk menyusun suatu RUU tentang Konsultan Pajak. Dengan yang sudah disampaikan sebelumnya ada yang bersifat kelembagaan tapi ada juga yang bersifat personal. Tapi sesungguhnya kalau ada yang Rancangan Undang-Undang ini sebenarnya memberikan pertanda persepsi pada orang. Judulnya saja sudah konsultan pajak yang memiliki kemampuan untuk memberikan suatu pandangan suatu jalan keluar suatu solusi untuk bagaimana objek bisa melaksanakan pajak secara baik dan benar.

Tadi juga sudah disampaikan kriterianya bersifat kapabilitas dan kemudian juga yang bersifat administratif. Tadi disampaikan itu ditunjukkan sertifikat itu sebenarnya bersifat administratif. Tapi sesungguhnya lebih ada yang substantif bagi saya. Saya meminta pandangan rekan-rekan ini. Yaitu tentang integritas karena ini menyangkut yang sangat substantif. Integritas ini kan melekat kepada pribadi orang. Karena banyak sekali kita ketemuan praktek-praktek konsultan ini kan kalau dalam teorinya kan laporan yang banyak peruntukan, banyak tujuannya. Ada laporan itu ditujukan untuk bank, sehingga nanti perusahaan dapat pinjaman. Ada juga laporan keuangan itu untuk rekan bisnis supaya ada garansi supplier dan seterusnya. Dan ada juga laporan keuangan itu untuk pajak.

Nah saya lebih cenderung pada laporan pajak ini. Kadang kali kita itu menghadapi keinginan dari pada objek. Cobalah diikuti supaya pajak saya itu supaya kecil kan gitu ya. Prakteknya saya dengar seperti itu. Kalau dari aspek negara kan bagaimana kan laporan keuangan itu seobjektif mungkin dan sering dan sekemampuan mungkin objeknya bisa bayar. Tapi kalau dari pihak pembayar pajak, biasanya kan dia itu konsultan bagaimana nih caranya dibandingkan ini nih, ngomongnya juga berbisik bisik. Dan juga ngomongnya berdua. Kan ini menguji integritas, kan didalam diri konsultan ini kan dia berada di dua pihak. Dia mewakili pribadi tapi ada kepentingan negara dan juga ada kepentingan para wajib pajak. Nah di sini perusahaan diperlukan suatu integritas bagaimana kita wajib pajak tidak dirugikan, negara juga tidak ikutikan kedhaliman. Nah ini banyak hal kadang-kadang belum apa-apa pajaknya sudah ditagih-tagih, gitu kan. Jadi kan banyak juga itu.

Jadi ada juga yang wajib pajak itu, wajib pajak yang pajak penghasilannya sudah cukup secara finansial dia sudah memiliki kemampuan dan assetnya juga sudah cukup tapi ada institusi di sini yang penghindar pajak. Nah ini konsultan ini berada pada mana ini? kalau ada orang seperti ini. Nah diperlukan satu integritas. Nah kira-kira apa sih sebenarnya peran integritas dalam konsultan ini untuk menghadapi hal yang summing dan setidak-tidaknya kan diperlukan kejujuran lah.

Saya hanya ingin mendapatkan penjelasan saja. Nah ini kan sangat penting integritas itu atau tidak dalam konsultan.

Sekian pak.

KETUA RAPAT:

Baik, Bapak-bapak IKPI dan IKPK tadi saya itu sudah mendengar draft usulan dari anggota tadi. Dan saya lihat ada peran-peran yang harus dilihat dari organisasi, organisasi profesi. Nah didepan kami sekarang saja ada IKPI dan IKPK. Jadi harus ada berapa organisasi profesi dibidang konsultan pajak. Siapa tahu ada juga, itu pertama.

Kemudian yang kedua, nanti yang perlu kami sampaikan. Kan di undang-undang ada yang terkait dengan organisasi profesi. Maka apakah itu dalam bentuk federasi yang mengakomodir seluruh organisasi profesi ataukah bagaimana supaya itu menjadi masukan kepada kami juga.

Tapi kami lanjutkan dulu karena yang bertanya banyak tadi, cuma Pak Hermanto tadi pertanyaannya banyak juga agak panjang ini. Atau cukup itu dulu ya biar dijelaskan dulu.

Pak Firman silakan pak, Pak Ketua.

WAKIL KETUA BALEG (FIRMAN SOBAGYO, S.E., M.H.):

Baik, terima kasih,

Bapak selaku Pimpinan rapat yang terhormat, Segenap dari IKPI dan IKPK.

Kalau didepannya dihilangkan maka maknanya akan berbeda, yang satu Komisi Penyiaran Indonesia agak sejuk tapi sebelah kanan mengerikan juga KPK. Yang perlu kami pertanyakan yang pertama adalah mengenai tugas pokok fungsi dari dua organisasi ini. Kalau IKPI itu kemana arahnya kalau IKPK itu ada kepabeaan. Mengenai masalah perpajakan pak. Saya ini termasuk orang yang paling resah melihat perilaku dari pada pajak. Karena justru analogi saya pajak ini seperti halnya PLN. Yang bisa nyuri sistem ya pake PLN. Sekarang yang bisa nyuri pajak siapa, ya pegawai pajak. Inilah jebolnya penerimaan negara sifat perilaku dari oknum.

Oleh karena itu kenapa pajak itu tidak pernah tercapai karena memang sistem yang dibangun oleh Pemerintah orde baru yang dulu, ini beda dengan sekarang. Kalau dulu gali lobang tutup lobang. Target penerimaan pajak sekian maka mereka setor dulu, itu Peraturan belakang. Sekarang ini berbeda harus dihitung dulu triknya bagaimana dan kemudian sekarang ini pak, yang terkait dengan masalah pajak ini yang dipikirkan itu rakyat. Negara ini tidak pernah memberikan suatu solusi dengan baik. Oleh karena itu kami menghimbau kepada teman-teman yang ada di sini. Marilah menjadi warga negara yang baik.

Kenapa demikian, karena negara kita ini menargetkan kepada wajib pajak, tapi tidak pernah tahu rakyat kita ini seperti apa. Tidak seperti negara-negara maju. Oleh karena saya memang termasuk orang yang sangat berharap keadaan dari pada organisasi ini harus mendapatkan pengakuan dari pada bentuk yang namanya regulasi undang-undang. Karena dengan adanya undang-undang ini langkah bapak harus semakin yakin. Karena adanya regulasi atau aturan yang memberikan sebuah payung hukum dan sebuah kepastian hukum

Namun tentunya yang harus saya sampaikan di sini adalah agar keberadaan bapak-bapak ini harus jelas. Keberadaan bapak-bapak ini harus bisa memberikan dorongan pertama kepada masyarakat. Jadi edukasi kepada masyarakat wajib pajak itu adalah penting. Kenapa objek dari pada penerimaan pajak itu menurun, terutama dari perorangan. Karena memang masyarakat ini pak, melangkah kepada kantor pajak ini seperti melangkah di kantor Polisi. Rasa ketakutan yang ada. Apalagi regulasi di negara kita ini adalah sebuah undang-undang. Contohnya kemarin adalah tax amesti. Akibat tax amesti itu bukan menambah penerimaan pajak. Tapi sekarang banyak perusahaan yang bangkrut. Karena tidak konsistennya dari Pemerintah melaksanakan dari pada undang-undang. Namanya saja tax amnesti, pengampunan. Begitu diampuni sudah stop dari pada itu. Nah begitu saya sampaikan pada Pemerintah, karena saya termasuk orang pertama yang diminta untuk mengurus perusahaan Pak Luhut Panjaitan ketika itu.

Tidak ada gunanya untuk ... ketika kita tidak punya data base yang baik. Ketika itu saya usulkan buka grei-grei itu. Grei itu adalah konsultan pajak itu yang harus menjadi penanggung jawab grei. Kalau di negara-negara barat pak, itu ada dokter layanan publik yang sudah pasti setiap dokter spesialis itu, dokter umum, itu mempunyai yang namanya pasien boleh menentukan. Pasien saya di

wilayah tertentu sekian jumlahnya. Dia tidak boleh bergeser dari jumlah itu. Dan dia mengawal mulai dari gate, sampai sakit gigi itu dipertanggungjawabkan di dokter itu. Nah yang saya ingin kan konsultan pajak juga seperti itu. Sehingga personel yang bapak tugaskan di perusahaan pajak ini, harus mampu merekrut terhadap masalah wajib pajak yang belum punya NPWP sampai mereka itu dapat membayar pajaknya dengan baik dan benar. Ini satu hal. Harapan kami ada di situ.

Kalau itu terjadi maka akumulasi terhadap penilaian pajak itu dapat meningkat dengan benar. Saya itu lebih baik kecil tapi banyak dari pada banyak tapi sedikit. Sekarang kan itu banyak tapi sedikit. Yang sedikit itu pun digergaji tengah jalan. Maka dari itu ada Gayus dan sebagainya. Nah ini tidak boleh lagi kedepan.

Nah kemudian keberadaan dari konsultan pajak itu berapa banyak pak. Pertanyaan Pak Bambang itu sudah keluar ya ibu. Justru jangan sampai nanti menjadi legitimasi untuk juga bagaimana menyiasati bahwa wajib pajak itu bukan semakin baik tapi justru seperti yang saya bilang tadi yang namanya mencuri strum. Jangan sampai nanti yang nantinya mengajari kepada wajib pajak, kalau kami mau bayar murah dibikin seperti ini. Ini yang terjadi pak. Yang berkeliraran oknum pajak itu. Sekarang dimana-mana seperti itu. Sekarang bagaimana mendorong supaya wajib pajak itu melakukan pembayaran pajak yang baik dan benar, justru sekarang ini mengajari kalau bapak membayar sekian, maka di sini ada laporannya.

Nah itu yang sekarang ini sering terjadi. Oleh karena itu Pak Pimpinan harapan kami adalah kita bisa memberikan sebuah aturan regulasi dalam bentuk undang-undang tapi target penerimaan negara harus lebih baik, pelayanan terhadap masyarakat juga harus lebih baik dan lebih sederhana. Katakanlah tidak boleh seperti sekarang pak. kami ini rata-rata kan orang berpendidikan. Bikin LKHP saja pusing pak. Kita mau bikin NPWP saja pusing pak. Kita selalu bayar mahal. Karena kan itu kita sebagai pejabat negara harus memenuhi kewajiban itu. Tetapi harapan saya kedepan itu supaya kaya kita-kita itu sudah tidak perlu lagi. Karena kalau sistem formulirnya sederhana kalau sistem prosesnya itu sederhana saya rasa tidak perlu.

Oleh karena itu saya mohon bapak, ini saya setuju kalau nanti pada waktu pembahasan ditingkatkan untuk hal-hal tertentu itu dapat dilibatkan, karena kan untuk hal terobosan-terobosan pak, pertama sistem pelaporan wajib pajak itu jangan serumit seperti sekarang ini lah. Jangan serumit seperti sekarang ini. Ini luar biasa, bahkan ada perusahaan yang tidak pernah diselesaikan oleh Pemerintah. Karena memang Pemerintah kita sadar sangat keterbatasan. Tapi ya itu permainannya di dalam juga sangat luar biasa.

Saya punya tetangga pejabat pajak pak. Luar biasa, rumah nya dimana-mana, kayaknya. Ini serius pak ini serius. Yang sekarang IKPK pak. Nah ini bapak kepabeaan. Saya termasuk orang yang sekarang mendorong agar kepabeaan dibongkar undang-undangnya. Karena kepabeaan ini mafia dalamnya. Mohon maaf kalau ada pensiunan kepabeaan. Kepabeaan itu hampir mirip seperti yang nama bapak itu IKPK, I nya dihilangkan. Ini sebuah lembaga yang super body, ini tidak boleh yang siapapun masuk di situ. Tidak boleh siapapun masuk di situ. Padahal kami tahu manipulasi itu ada di kepabeaan. Penurunan biaya tarif masuk, barang masuk selundupan dan sebagainya. Ini kan sebuah regulasi yang dibentuk pada jaman Orde Baru. Ini tertentu, saya rasa ini sudah waktunya dibongkar.

Nah oleh karena itu teman-teman juga harus ada kesadaran ke sana dan untuk kepabeaan ini juga mohon nanti bisa diberikan satu masukan kepenajaman-penajaman untuk celah-celah di sana pusat masalah manipulasi, penurunan tarif yang terjadi dengan pajak, ini konsekuensinya ke sini semua pak. Coba bayangkan kalau yang didalam kontainer itu isinya verari yang kemudian dimasukkan spare part. Itu nilai pajaknya akan turun drastis, kalau daging sapi dimasukkan di situ namanya lain, WNPPnya namanya apa itu.

Nah ini pak yang perlu saya sampaikan. Kenapa? 5 tahun yang lalu sebagai Pimpinan Komisi IV sidang di sana itu memang sangat luar biasa. Bahkan ada pertanyaan yang pejabat pajak ketika itu, kalau ada barang masuk ke wilayah pabeaan tanpa ada surat. Dia waktu itu mengatakan, kami akan memberikan kesempatan untuk melengkapi surat. Pertanyaan saya waktu itu, kalau ada barang masuk ke wilayah tanpa surat, ini legal atau tidak. Jawabannya mengatakan kalau saya sebagai orang hukum pejabat itu ini illegal. Tapi kenapa dia biarkan, ada undang-undang yang memperbolehkan bahwa kurun waktu tertentu boleh melengkapi surat-suratnya. Ini sudah memberikan dorongan kepada kita bahwa undang-undang tidak benar. Tetapi ketika kita merevisi

undang-undang, palang besinya luar biasa pak mereka. Kenapa? Karena ada kepentingan individual dan kepentingan kelompok menjadi mafia dari kepebeanaan itu. Nah ini contohnya.

Oleh karena itu pak, bapak menginginkan ini ada undang-undang mari ini kita bongkar. Kita perbaiki secara bersama-sama bahwa kedepan harus lebih baik dan kami berharap juga dengan adanya undang-undang bapak bisa memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang lebih baik. Kira-kira itu pak. Terima kasih

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT :

Tanya keluhan Pak Firman tadi sebetulnya bapak-bapak dan ibu-ibu dari IKPI dan IKPK mengatakan seperti itu ya. Artinya kami yang mengeluh ke bapak-bapak kan DPR RI pembuat undang-undang ya kan pak. Tapi karena DPR RI juga merasa memang itu perlu dilakukan perubahan-perubahan ya nanti diterima sebagai masukan.

Kemudian juga terkait dengan tadi pak. Konsultan pajak sebetulnya sekarang ini kan sudah ada ya pak. Ini saya anu, saya itu, sudah ada ya pak, dan legal berizin juga sudah ada ya pak. Dari mana dapat izin yang sekarang ini, konsultan pajak. Pakai mike saja pak.

IKPK (BAMBANG):

Izin pak, itu dari Direktorat Jenderal pajak pak.

KETUA RAPAT:

Oh dari Direktorat Jenderal pajak ya? baik. Nah mungkin nanti ditambahkan lagi pak selain tadi tentang organisasi. Karena di undang-undang ini pak, ukuran mengenai organisasi kayaknya cukup signifikan dan kuat sekali di profesi pak. Kan kita juga berpikir kalau ada konsultan yang sesuai dengan undang-undang musti konsultan itu independen. Sehingga dia itu punya posisi yang kuat, tidak berpihak ke sana dan kemari dan secara adil memperlakukan proyeknya itu.

Lalu yang soal pelaku dari konsultan pajak, saya lihat draft ini belum sempurna ya Pak Misbah ini menyampaikannya, kita sempurnakan dalam hal harmonisasi. Yang pelaku konsultan pajak itu perseorangan dan kalau pelaku perseorangan itu ada yang perseorangan dan berbadan hukum atau bagaimana?

IKPK (BAMBANG):

Semua pelaku konsultan pajak itu mengikat ke individu. Jadi perseorangan tapi dia bisa membuat kantor. Dengan anggota konsultan pajak yang sudah bersertifikasi.

KETUA RAPAT:

Oh gitu, silakan nanti kalau ada masukan ya. Apakah dimungkinkan kalau yang namanya konsultan pajak itu hanya pribadi tapi institusi. Seperti pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu kan bisa dokter dan bisa rumah sakit, artinya kalau rumah sakit menyediakan dokter-dokter yang diperlukan. Kalau dokter ya dokter praktek. Orang sakit dia maka dia datang ke dokter gigi, tapi orang sakit dia datang ke rumah sakit nanti yang melayani ya dokter gigi juga.

Jadi ini anunya ya sebagai undang-undang, kita kan berbicara untuk perbandingan untuk masukkan pak. Apakah perseorangan melekat atautkah itu juga bersifat apa badan hukum dan kelembagaan.

Saya persilakan ini jawaban dan masukan seluruh pertanyaan tadi pak. Silakan siapa dulu silakan nanti dapat dimulai.

IKPI:

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Dari pertanyaan yang disampaikan mengenai laporan Keuangan dan sebagainya. Itu menurut pendapat kami, karena adanya organisasi dari konsultan pajak mempunyai standar profesi dan kode etik yang harus ditaati oleh setiap anggota. Maka integritas dari pada konsultan itu menghadapi apa yang ditanyakan laporan keuangan dipermainkan dan sebagainya, *Insya Allah* mudah-mudahan tidak terjadi. Apabila masyarakat sampai mendengar, mohon hati-hati. Sebab tidak jarang banyak konsultan pajak yang abal-abal pak. Konsultan pajak yang tidak punya izin praktek, tidak menjadi anggota organisasi tetapi melaksanakan praktek konsultan pajak. Ini yang sering ada masalah dan terbuka dan ternyata sampai saat ini tidak ada satupun yang merupakan anggota dari pada IKPI. *Alhamdulillahirabbil'alamin*.

Kemudian mengenai apa yang disampaikan Bapak Pimpinan, Bapak Ketua Pak Firman. Ini juga menuju ke standar profesi dan kode etik. Perlu kami tambahkan juga di IKPI itu ada yang namanya PPL pengembangan profesi berkelanjutan yang terus dikerjakan oleh setiap anggota dan setiap brevet, tingkatan brevet a, b, c, itu ada satuan greaged PPL yang harus dipenuhi. Untuk itu mau tidak mau setiap anggota IKPI itu menjalani PPL dengan taat. Karena kalau sampai kurang nilainya maka tidak ada atau bisa ditambah dengan tahu dan sebagainya. Tetapi kalau berkurang sampai dua tiga kali, selain mendapat teguran maka bisa dengan pencabutan izin.

Jadi dengan apa ketatnya pengawasan dari pada organisasi, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sampai sekarang *Alhamdulillahirabbil'alamin* bisa terjadi lebih baik dan mudah-mudahan kedepan lebih baik lagi. Terima kasih

KETUA RAPAT:

Silakan dari IKPK.

IKPK:

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Tadi disampaikan soal integritas. Sebenarnya kalau kita melihat laporan keuangan itu tidak banyak tujuan. Mohon maaf anggota Dewan. Kenapa? Karena kita punya namanya PSAK. Standar akuntansi keuangan yang mengatur bagaimana kita menyusun laporan keuangan. Kalau misalnya seorang konsultan dia memberikan option ada laporan keuangan untuk pajak, untuk supplier. Artinya dia secara jelas-jelas sudah tidak punya integritas, sudah tidak punya etika. Kenapa? Karena dia melanggar Undang-Undang KUP untuk pajak kan Pasal 35 dan Pasal 41. Dia melanggar juga Pasal 263 KUHP. Jadi kalau dia melanggar sudah tidak punya etika.

Itulah sebabnya dikita, bahwa integritas kita terkait dengan adanya kepatuhan dengan undang-undang yang ada. Jadi kalau ada laporan keuangan dua versi, tiga versi sudah dapat dipastikan dia melanggar banyak aturan. KUHP, KUP, jadi integritas merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dan harusnya tidak terjadi kalau seorang konsultan pajak itu mengerti aturan, tidak hanya pajak tapi juga melihat undang-undang yang lain. Makanya pada bagian lain kita cantumkan tidak hanya tentang pajak. Ini semua nempel semua. Kita tidak bisa hidup dalam satu undang-undang. Jadi kalau kita menjalankan organisasi dalam konsultan pajak, kita juga melihat ada Undang-Undang PT, Undang-Undang KUHP dan semuanya.

Jadi kembali lagi terima kasih, itu soal integritas sudah dapat dipastikan mereka yang membuat dua atau tiga laporan keuangan itu bukan lagi akuntan dan bukan lagi konsultan pajak. Jadi itu merupakan sesuatu yang penting dan integritas itu nomor satu. Terima kasih

KETUA RAPAT:

Masih ada penjelasan tambahan. Kalau cukup yang penting ada. Bapak mau menyampaikan silakan.

IKPI:

Kami sampaikan bahwa maaf Pimpinan bahwa sampai saat ini kami ini dari IKPI belum mempunyai RUU KPI ini, sehingga kami dalam sidang ini, dalam acara ini belum menyampaikan masukan secara tertulis dan sebagainya. Apabila diizinkan kami mohon RUU untuk nanti kami sampaikan masukannya. Terima kasih

KETUA RAPAT:

Bagaimana anggota izin kan tidak? baik nanti kami berikan copynya pak.

Pak Firman silakan.

WAKIL KETUA BALEG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Mungkin saya nanti mengusulkan pak, kalau bisa dari Pengusul itu juga bisa berelaborasi lah dengan bapak dan ibu sekalian. Supaya nanti rapat dimulai Pengusul itu masih bisa saling menyempurnakan terhadap Rancangan Undang-Undang ini. Karena sumber dari Rancangan Undang-Undang ini kan dari Pengusul. Karena kalau nanti bapak-bapak dengan Pengusul sudah frekuensinya sama, saya rasa nanti dalam pembahasan juga akan berlaku sama. Sehingga tinggal nanti kita sempurnakan lagi dengan aspek-aspek yang lain.

Saya rasa itu akan lebih elok lagi pak. Terima kasih. Kalau ditanya mengenai posisi ya tentunya setelah selesai MD3 ini, kita selesai baru kita bisa jadwal ini. Reses ya.

KETUA RAPAT:

Nanti diperkirakan nanti pak kita rapat-rapat selanjut, masa harmonisasi dan lain sebagainya itu setelah reses. Ya kira-kira akhir tanggal berapa masa sidang berikutnya. Maret mungkin sekitar tanggal 15, hanya 15 hari pak, ini yang reses sekarang, hanya dua minggu. Awal pak, ini sekitar Maret awal, mungkin sebelum 20 an.

WAKIL KETUA BALEG (FIRMAN SUBAGYO, S.E., M.H.):

Pak Totok, saya sedikit pak. Kalau nanti undang-undang ini sudah diundangkan, kira-kira bapak sudah punya estimasi atau prediksi dengan kelembagaan ini diberikan regulasi yang lebih jelas. Penerimaan pajak negara itu bisa naik berapa persen. Itu penting pak.

Karena begini, supaya itu ada suatu ketika nanti ini dengan Pemerintah. Nanti dalam pembahasan dengan Pemerintah bahwa pentingnya dari undang-undang ini bisa meningkatkan penerimaan dari pada penerimaan negara sehingga kita tidak dibayang-bayangi dan setiap tahun kita itu tidak devisit anggaran. Kita musti atau setiap devisit anggaran kita akan membuat atau menjual apa namanya obligasi negara yang bagaimanapun juga hutang. Atau kalau hutang negara itu juga bapak bisa memprediksi dari tahun ke tahun sampai tahun sekian. Itu juga kita dapat memperdiksi tapi minimal kita dapat gambaran bahwa dengan adanya lembaga ini diberikan satu payung hukum yang kuat maka dapat memberikan kontribusi penerimaan negara yang terukur. Kira-kira begitu pak.

KETUA RAPAT:

Maskudnya nanti pak, ketika pembahasan diharmonisasi tadi kan disepakati nanti dari IKPK nanti ada satu atau dua orang ahli, nanti IKPI juga demikian. Nanti juga membuat semacam prediksi itu nanti disampaikan. Dan pengusulnya itu Pak Misbakhun nanti silakan pak berdiskusi lebih lanjut. Karena saya lihat ini usulan RUU Konsultan Pajak itu terutama berangkat dari niat baik, saya lihat. Dari idealisme persoalan pajak itu publik kita sehari-hari. Dari yang besar sampai yang kecil, sehingga memang perlu ada undang-undang yang mengatur tentang itu, yang harapannya iklim mengenai perpajakan kita akan lebih baik, kalau bisa menambah penerimaan negara dan lain-lain.

Jadi kalau bisa draft itu sudah pasti tidak sempurna pak. Diharmonisasilah sudah pasti kita bulatkan konsep ini menjadi cukup memadai, sehingga layak untuk dapat kita bahas lebih lanjut bersama dengan Pemerintah dalam bentuk RUU sampai dengan pembahasan ditingkat dua menjadi undang-undang.

Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang memberikan kontribusi pemikirannya untuk RUU Konsultan Perpajakan dan terima kasih kepada para anggota dan Pimpinan yang telah mengikuti rapat ini.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbil 'alamin*, rapat saya tutup.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.30 WIB)

Jakarta, 6 Februari 2018

Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H.